AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA DI DESA KORI KECAMATAN KODI UTARA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 2018

Yohanis Ndoda¹, Crisistomus E. Oiladang², Rikhardus Seran Klau³

Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: Ndoda1005@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa tahun 2018 di Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Penggunaan Alokasi Dana Desa dibutuhkan pertanggungjawaban yang pasti terkait dengan penggunaan dana itu sendiri. Akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa dilihat dari akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kori sejauh ini berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah / desa itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa informan dapat dikatakan bahwa dalam akuntabilitas hukum untuk penggunaan Alokasi Dana Desa belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana ada pemerintah desa yang tidak menaati segala peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Alokasi, Dana Desa, Desa Kori*

ABSTRACT

The success of the implementation of development at the Village level is basically determined by the extent of commitment and consistency of the government and village communities to work together to build the Village. The success of development carried out in a participatory manner starting from planning, implementation to monitoring and evaluation will further ensure the sustainability of development in the village. On the other hand, problems and distrust of one another will easily arise when all communication and information space for the

public is inadequate. The purpose of this study was to determine the accountability of the use of Village Fund Allocation (ADD) in village development in 2018 in Kori Village, Kodi Utara District, Southwest Sumba Regency. The use of Village Fund Allocation requires definite accountability related to the use of the funds itself. Accountability for the use of Village Fund Allocation (ADD) in village development is seen from legal accountability, process accountability and program accountability. So far, the management of Village Funds in Kori Village has been running in accordance with the regulations set by the Central Government and the regional / village government itself. Based on the results of interviews conducted by the author with several informants, it can be said that the legal accountability for the use of Village Fund Allocation has not yet been implemented in accordance with applicable regulations where there are village governments that do not comply with all applicable regulations.

Keywords: *Accountability, Allocation, Village Fund, Kori Village*

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia dalam perkembangannya senantiasa dilakukan perencanaan dan pengembangan kearah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah kehidupan bangsa yang lebih baik. Untuk itulah pembangunan dimulai dari Desa atau yang dikenal dengan istilah Desa Membangun – Membangun Desa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal telah diakui dalam Undang-Undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang no.6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan dasar ketentuan inilah, Desa dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa tersebut menempatkan Desa sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang secara politis mempunyai kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur masyarakat Desa atau komunitasnya. Dengan keadaan tersebut, Desa memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara lebih luas. Desa adalah garda terdepan untuk mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program pemerintah.

Pembangunan Desa merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Desa yang dicita-citakan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana yang diungkapkan Soemantri (2010:70), bahwa pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa

sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa, karena lembaga kemasyarakatan Desa adalah mitra kerja Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Pembangunan Desa perlu diarahkan pada terwujudnya “Desa yang mandiri”, yaitu Desa yang warganya memiliki semangat yang tinggi untuk membangun, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan dan merealisasikan rencana tersebut seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama dapat mengandalkan pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat Desa, serta mampu menjaga keberlangsungan proses pembangunan yang ada di Desa (Tjokrowinoto,2012:41).

Berdasarkan pada fenomena di atas, maka muncullah gagasan-gagasan dan rencana-rencana pembangunan yang bertujuan untuk melepaskan masyarakat pedesaan dari permasalahan keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam permasalahan pembangunan pedesaan disebabkan oleh rendahnya aset yang dikuasai oleh masyarakat pedesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat ke sumber daya ekonomi, seperti informasi, teknologi

dan jaringan kerjasama. Oleh sebab itu diperlukan sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan pedesaan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan Desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat Desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah menyediakan anggaran pembangunan secara khusus dimana dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk alokasi dana Desa. Undang-Undang no.9 tahun 2015 mengenai Pemerintahan Daerah mengatur tentang pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah guna melakukan serangkaian proses mekanisme serta tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pada pembangunan. Dalam proses perencanaan pembangunan di dalamnya terdapat pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan adalah sebuah program daerah di bidang keuangan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengembangkan misi untuk mewujudkan suatu strategi melalui berbagai macam kegiatan. Dalam Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang Desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa ditangani dari anggaran pendapatan dan belanja Desa dan bantuan pemerintah Desa sesuai dengan surat menteri dalam negeri

no.140/640 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Desa. Melalui alokasi dana Desa sehingga dana yang diberikan kepada Desa berasal dari dana pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.

Pemberian alokasi dana Desa adalah wujud dari pemenuhan hak Desa guna menyelenggarakan otonominya sehingga tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pembedayaan masyarakat serta meningkatnya peran pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal tersebut dapat mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai suatu kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah

demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya. Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawabannya, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah berhak mengawasi serta mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agen agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Akuntabilitas dimaksudkan diantaranya adalah pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran Desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar Desa terkait keterbatasan dalam keuangan Desa. Seringkali anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan empat faktor utama yang diungkapkan oleh Hidayana (2005:8-10):

1. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatan yang masih sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat Desa yang sangat rendah.
3. Rendahnya dana operasional Desa demi menjalankan pelayanan.

4. Banyak program pembangunan yang masuk ke Desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Sistem pengelolaan dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban yang merujuk pada Undang-Undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan alokasi dana Desa ini dilaksanakan dengan dana fisik dan non-fisik yang berkaitan dengan indikator perkembangan Desa. Indikator perkembangan Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan serta tingkat kesehatan. Dengan adanya pemberian alokasi dana Desa pembangunan fisik selama ini dianggap relative cukup untuk memenuhi prasarana dan sarana Desa, namun demikian, Desa-desa masih jauh dari keberhasilan pembangunan fisik, termasuk Desa Kori yang akan diteliti pada tahun 2019. Desa Kori merupakan sebuah Desa yang berada di daerah dataran rendah yang berada di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam alokasi dana Desa pada tahun 2018 dibagi dalam 2 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins (1984), dimensi akuntabilitas yang dipenuhi oleh

lembaga publik yakni: akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Dalam akuntabilitas hukum pertanggungjawaban pelaksanaan ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan publik dan pelayanan yang merupakan tuntutan masyarakat. Manajemen keuangan Desa berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk penggunaan alokasi dana Desa belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana ada aparat hukum yang tidak menaati segala peraturan yang berlaku. Dalam akuntabilitas proses terkait dengan prosedur atau mekanisme kerja yang sesuai, diharapkan pencairan dana Desa tepat waktu, tetapi pada kenyataannya keterlambatan pemerinah Desa dalam melakukan laporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang berkaitan dengan penyaluran dana setelah dicairkan dari bank dan waktu pencairan dana juga terlambat sehingga tahapan pencairan selanjutnya terlambat dan dana tersebut tidak bias dimanfaatkan dengan baik dan semua program yang telah disepakati dari Musdus dan Musrenbangdes sering terjadi masalah antara pemerintah Desa dan masyarakat karena banyak masyarakat tidak menerima segala keputusan yang telah ditetapkan bersama, sedangkan dalam akuntabilitas program berkaitan dengan pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

1. Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 bahwa dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Mardiasmo (2006: 3), akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Nasirah (2016), akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan control, terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hal ini, maka diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan guna mencapai tujuan dimaksud. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seorang atau unit organisasi guna mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Mahmudi (2010:23), akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan

penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Dengan berdasarkan kepada beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban untuk menyajikan serta melaporkan segala tindak lanjut dan tindakan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan memiliki arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dan terapan dari *good governance*. Hal ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *clean government* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas jika dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada sebuah pencapaian tujuan.

2. Sifat Akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah wajib menyediakan informasi yang dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan guna menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara pihak yang memegang kendali serta mengatur entitas dengan pihak yang mempunyai kekuatan formal terhadap pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini, dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* guna memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap semua kegiatan yang

dilakukan dan hasil usaha yang didapatkan sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan ini, akuntabilitas pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya serta sumber dana masyarakat dan penggunaannya. Akuntabilitas bisa dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* mengatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan bisa dikategorikan dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektifitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dapat dilihat sebagai sebuah tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif terhadap tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap dimaksud adalah:

1. *Probility and Legality Account ability*. Hal ini menyangkut dengan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Process Accountability*. Dalam hal ini digunakan proses, prosedur ataupun ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.
3. *Performance Accountability*. Pada level ini dapat dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.
4. *Program Accountability*. Pada kategori ini akan disoroti penetapan serta pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan tersebut.
5. *Policy Accountability*. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai macam kebijakan yang akan direalisasikan atau tidak.

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebetulnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi dapat menjalankan dan mengatur kehidupan rakyatnya dalam bernegara dengan mengeluarkan berbagai aturan dan mengambil serta menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban atas semua aktivitasnya kepada masyarakat.

3. Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel

Finner dalam Joko Widodo menguraikan bahwa akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran sebuah tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar menjadi sumber akuntabilitas yang dapat memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja lebih keras. Masyarakat luas sebagai penulis yang obyektif yang kemudian dapat menentukan akuntabel atau tidaknya sebuah birokrasi. ada beberapa ciri pemerintahan yang akuntabel diantaranya sebagai adalah:

1. Dapat menyajikan sebuah informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan bagi publik.
3. Dapat menjelaskan serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
4. Dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengambil bagian dalam sebuah proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sasaran terhadap publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat juga dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan

suatu program maupun kegiatan pemerintah.

4. Macam-macam akuntabilitas

Dalam akuntabilitas publik terdiri dari dua macam menurut (Mardiasmo, 2009:21), yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal
Pertanggungjawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana atas otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) terhadap pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah pusat terhadap MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal
Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas. Akuntabilitas harus dilakukan melalui media yang selanjutnya bisa dikomunikasikan kepada pihak internal ataupun pihak eksternal (publikk), secara periodik dan secara tidak terduga sebagai sebuah kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Akuntabilitas mempunyai 2 tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam sebuah organisasi internal

penyelenggara negara termasuk di dalamnya pemerintah, dimana pada setiap jabatan atau petugas publik baik itu individu maupun kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung tentang perkembangan kinerja maupun hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

2. Akuntabilitas eksternal, terdapat di setiap lembaga negara sebagai sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan sudah dilaksanakan pula untuk kemudian dikomunikasikan pada pihak eksternal dan lingkungannya.

5. Pembagian lainnya

Menurut Mardiasmo (2009:21) terdapat jenis pembagian lainnya dalam akuntabilitas, yaitu:

- a. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan adalah sebuah pertanggungjawaban tentang integritas keuangan, pengungkapan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara pertanggungjawaban, hal ini merupakan sebuah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku serta mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
- b. Akuntabilitas manfaat
Akuntabilitas manfaat (efektifitas) pada dasarnya mengutamakan perhatian terhadap hasil dari sebuah

kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, semua aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian sebuah tujuan (dengan memperhatikan biaya serta manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki maupun prosedur. Efektifitas yang harus dicapai tidak hanya merupakan output tetapi juga yang lebih penting ialah efektifitas dari sudut pandang output tetapi yang lebih penting ialah efektifitas dari sudut pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

c. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban tentang apakah sebuah prosedur penetapan dan pelaksanaan sebuah kebijakan telah dipertimbangkan dengan masalah moralitas, etika, kepastian hukum dan ketaatan terhadap keputusan politis guna mendukung pencapaian tujuan akhir yang sudah ditetapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana dari akuntabilitas proses.

Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2000:43), dijelaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Perlu adanya komitmen dari pimpinan serta seluruh staf guna melakukan

- pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Pelunya suatu sistem yang bisa menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten terhadap Peraturan perundang-undangan.
 - c. Wajib untuk dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
 - d. wajib berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta manfaat yang akan diperoleh.
 - e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai sebuah katalisator perubahan dalam bentuk pemuktahiran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.
7. Dimensi Akuntabilitas
- Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga public menurut Hopwood dan Tomkins (1984), Elwood (1993) ialah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas Hukum
Pertanggungjawaban pelaksanaan suatu ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan pelayanan yang merupakan tuntutan masyarakat. Penggunaan dana publik harus dilakukan dengan cara yang benar dan sudah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan kepada hukum dan peraturan lain yang dinyatakan ketika menjalankan sebuah organisasi dan menuntut penegakan hukum.
 2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu prosedur yang digunakan dalam melaksanakan sebuah tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen serta prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui sebuah pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif serta murah biaya.
 3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas yang berkaitan terhadap perkembangan apakah tujuan yang ditetapkan bias dicapai atau tidak dan apakah organisasi sudah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain, program-program organisasi seharusnya merupakan sebuah program yang bermutu untuk mendukung setiap strategi dan pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi.
 4. Akuntabilitas Kebijakan
Terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik seharusnya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan akibat di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa saja tujuan kebijakan tersebut dibuat, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan berdampak dan memperoleh manfaat dan dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Dari keempat dimensi akuntabilitas diatas, penulis akan meneliti keempat dimensi akuntabilitas tersebut, yakni pada akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

Desa

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang dimana diakui oleh pemerintahan nasional dan berada pada daerah kabupaten. Menurut Widjaja, Desa dilihat sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan aslinya berdasarkan kepada hak asal-usul yang bersifat istimewa. dasar pemikiran mengenai masyarakat Desa ialah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:3).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja tersebut sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan sebuah komunitas yang dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang mempunyai otonomi asli sangat strategis sehingga seharusnya mendapatkan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi Desa yang kuat maka akan mempengaruhi

secara signifikan perwujudan sebuah otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Desa atau juga disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat yang juga diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman tentang Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat juga diartikan sebagai sebuah komunitas dalam kesatuan geografis tertentu serta antar mereka saling mengenal dengan baik corak kehidupan yang relatif homogen dan juga banyak bergantung secara langsung kepada alam. Oleh sebab itu, Desa diasosiasikan sebagai sebuah masyarakat yang hidup dengan cara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat serta tradisi yang kuat, bersahaja, dan tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara,2005:180).

Berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang juga memiliki batas-batas wilayah yang berwenang guna mengatur dan mengurus kepentingan keberlangsungan hidup masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat-istiadat setempat yang

juga diakui dan dihormati dalam sebuah sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada pada Kabupaten atau Kota, dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat 2 tertulis bahwa pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat, serta
- e. Sasaran dan prasarana pemerintahan.

Dalam sebuah pembangunan nasional, Desa memegang peranan yang sangat penting karena Desa adalah struktur pemerintahan yang terendah dari sistem Pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti saja bermuara kepada pembangunan Desa dan dapat juga dikatakan bahwa masa depan Indonesia terletak dan bergantung pada berhasilnya pembangunan di Desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah tersebut masyarakat haruslah dilibatkan maupun diberdayakan dalam sebuah pembangunan Desa, karena disadari atau tidak pembangunan Desa sudah banyak dilakukan sedari dulu sampai sekarang akan tetapi secara umum hasilnya belum bias dikatakan memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di peDesaan.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo dalam bukunya *Membingkai teori* menjadi tesis, (2009), menguraikan bahwa Desa merupakan sebuah kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Unsur-unsur yang terdapat dalam Desa meliputi:

- a. Desa (lingkungan geografis)
- b. Penduduk, yang meliputi berbagai macam hal mengenai kependudukan seperti jumlah, persebaran, mata pencaharian dan lain sebagainya.
- c. Tata kehidupan, meliputi segala hal yang menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat Desa.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dan Desa adat atau yang disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur dan mengurus masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering diistilahkan dengan kampung yaitu sebuah daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang mana sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani , sedangkan

secara administrasi, Desa terdiri dari satu atau lebih dusun yang digabungkan sehingga menjadi sebuah daerah yang berdiri sendiri serta berhak mengatur rumah tangga sendiri.

Berdasarkan dari pengertian Desa menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan suatu pembagian wilayah administratif yang dipimpin oleh kepala Desa dan memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Pembangunan Desa

Istilah “pembangunan” biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia, namun saat ini sudah berkembang istilah pembangunan dengan menggunakan bahasa asing sehingga untuk mencari pengertiannya mengandung kerancuan. Pembangunan dalam sebuah rumusan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan maupun fungsi yang sangat beragam yang melekat kepada istilah pembangunan itu. Oleh karena itu, pembangunan mencakup banyak makna baik itu fisik maupun non fisik, baik itu proses ataupun tujuan menurut Raharjo dalam Krisnha S, Andini dkk (2014:1).

Pembangunan sendiri memiliki pengertian yang sangat luas. Secara sederhana, pembangunan ialah perubahan kearah yang lebih baik dan pastinya lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan juga bisa diartikan sebagai sebuah gagasan demi mewujudkan sesuatu yang

dicita-citakan, yang mana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha guna mengarahkan serta melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pembangunan bangsa.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pembangunan merupakan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan kearah yang lebih baik itu sendiri memerlukan pengerahan seluruh budidaya manusia guna mewujudkan apa yang dicita-citakan dengan sendirinya. Pembangunan adalah sebuah proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan serta peradaban manusia. Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipengaruhi dengan suasana perubahan. Inti pembangunan ialah bukan hanya terjadinya struktur fisik atau material, tetapi juga menyangkut dengan perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus dapat membawa manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari. selain itu, pembangunan juga merupakan upaya untuk memajukan serta memperbaiki dan meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada sebelumnya.

Menurut undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahawa pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup serta kehidupan untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa. Sementara

Denis Goulet dalam Arif (2000: 105), dalam kajiannya tentang etika dan falsafah pembangunan menjealaskan bahwa pembangunan haruslah menghasilkan solidaritas yang baru yang mengakar kebawah. selain itu, pembangunan juga wajib memperhatikan keragaman budaya lingkungan serta menjunjung tinggi martabat dan kebebasan masyarakat. Goulet juga menguraikan bahwa pembangunan pasti saja akan menimbulkan masalah-masalah etis yang sejak lama telah dihadapi oleh masyarakat, seperti hakekat serta dasar-dasar kehidupan yang lebih baik yaitu keadilan dalam relasi-relasi kemasyarakatan.

Pembangunan pedesaan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *community development*, pembangunan masyarakat Desa adalah proses perubahan sosial yang direncanakan guna mengubah sebuah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki dan lebih baik. Menurut Raharjo, pembangunan masyarakat Desa adalah bagian dari sebuah pembangunan nasional. Secara khusus pembangunan masyarakat Desa memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Pembangunan masyarakat Desa artinya pembangunan masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern.
- b. Pembangunan masyarakat Desa artinya membangun swadaya

masyarakat serta rasa percaya diri sendiri.

- c. Pembangunan peDesaan tidak lain dari pembangunan terhadap usaha tani atau membangun pertanian.

Konsep pembangunan masyarakat Desa mengacu pada teori dasar bahwa sasaran pembangunan yang utama ialah manusia. Dalam membangun manusia, maka harus mendorong sehingga masyarakat berkemauan dan juga berkemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Salah satu dimensi yang penting dalam sebuah pembangunan masyarakat Desa ialah desentralisasi dalam artian bahwa pembangunan masyarakat Desa juga ialah bagian dari upaya melakukan desentralisasi pembangunan nasional. Sedangkan dalam pembangunan Desa yang bersifat sentralistis mengakibatkan ketidakmampuan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa, dan juga adanya ketergantungan masyarakat kepada pemerintah pusat. Dengan melihat proses pembangunan Desa selama ini ada beberapa masalah mendasar, yaitu:

- a. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.
- b. Urban bias (ketergantungan antara masyarakat Desa dengan kota).
- c. Belum berkembangnya kesadaran aparat pemerintah terhadap pembangunan masyarakat Desa.

d. Masih lemahnya koordinasi antara instansi sehingga menyebabkan masyarakat Desa lebih sering menjadi obyek daripada subyek pembangunan.

Oleh sebab itu, pendekatan utama yang seharusnya digunakan dalam pembangunan masyarakat Desa ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat Desa dalam segala proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan kepada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal.
3. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan secara lintas sector serta lintas daerah ke dalam sebuah proses pembangunan yang menyeluruh dan juga terpadu.

Masyarakat peDesaan tidak hanya sebagai penonton, akan tetapi mereka harus juga secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil pembangunan. Namun pada pelaksanaannya perlu ada pihak maupun suatu lembaga yang dapat mengorganisir, memfasilitasi serta menggunakan masyarakat peDesaan. Pembangunan peDesaan yang partisipatif merupakan sebuah kondisi fundamental yang berlaku dan juga dilakukan sedari dulu sampai sekarang dan tetap relevan untuk masa depan. Partisipasi masyarakat itupun

mengikuti perkembangan zaman dari sebuah sistem pemerintahan yang berlaku dalam suatu kurun waktu tertentu.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana Desa merupakan alokasi khusus Desa yang sedianya dialokasikan oleh proses, melalui peraturan Desa (Kabupaten) tujuan utamanya ialah untuk mempercepat pembangunan pada tingkat Desa baik itu pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia.

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa alokasi dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten maupun Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Kemudian yang dimaksud dengan sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah ialah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai dalam pasal penjelasan pula disebutkan bahwa alokasi dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat serta pembangunan dan 30% untuk pemerintah Desa (DPD).

Menurut Sadan (2004:10) alokasi dana Desa ialah dana responsivitas negara guna membiayai kewenangan Desa dan memperkuat kemandirian Desa, kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan

adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh negara.

2. Kewenangan atribusi organisasi lokal perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.

3. Kewenangan delegatif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Menurut Julianta (2003:98) alokasi dana Desa merupakan dana bagian alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten sebagai perwujudan pemerataan kebutuhan, pengeluaran untuk menyokong proses-proses pemberdayaan masyarakat peDesaan, atau dapat dikatakan bahwa alokasi dana Desa ialah dana alokasi umum (DAU) yang secara presentasi Desa berhak mendapat bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten untuk mendukung keangsuran kebutuhan masyarakat peDesaan.

Bantuan langsung alokasi dana Desa merupakan bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah Desa serta digunakan guna meningkatkan sarana pelayanan masyarakat yang pemanfaatannya serta administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa. Jadi, pada intinya pemberian alokasi dana Desa adalah amanah UU

no.32 tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan Undang-undang no.6 tahun 2014. Sedangkan perhitungan besar ADD didasarkan kepada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 no.140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten atau Kota kepada pemerintah Desa.

1. Tujuan Pemberian Alokasi Dana Desa

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Desa oleh pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Sadu Warsistiono dan Irwan Taher, 2006:112)

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa ialah sebagai berikut:

- a. Alokasi dana Desa dalam APBD Kabupaten atau Kota dianggarkan pada bagian pemerintah Desa.

- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Desa.
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana Desa kepada Bupati, kepala bagian pemerintah Desa, sekretaris daerah Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan.
- d. Bagian pemerintah Desa serta Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan serta Kabupaten atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan atau aset daerah (BPKD/AD).
- e. Kepala bagian keuangan, sekretaris Desa atau kepala BPKD atau BPKK/AD akan menyalurkan alokasi dana Desa dari kas daerah ke rekening Desa.
- f. Mekanisme pencairan alokasi dana Desa dalam APBD Desa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah, Kabupaten atau Kota.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akuntabilitas pelaksanaan dana Desa dalam pembangunan Desa, serta meringkaskan kondisi, situasi dan berbagai variabel yang timbul dalam pelaksanaan alokasi dana Desa di desa Kori, dan kemudian mengangkat ke permukaan tentang bagaimana karakter atau gambaran

tentang kondisi, situasi yang terjadi pada saat pelaksanaan alokasi dana Desa di Desa Kori tersebut. (Bungin, 2005)

Fokus dalam penelitian ini adalah akuntabilitas alokasi dana Desa dalam pembangunan Desa. Dimana ada empat jenis akuntabilitas yang menjadi focus penelitian, yaitu : Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, yang nantinya akan dianalisis menggunakan reduksi data, kemudian data akan disajikan dan data akan diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses pembangunan desa yang benar-benar partisipatif dan

berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional yang untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa tahun 2018 di Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas terkait erat dengan kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa dibutuhkan pertanggungjawaban yang pasti terkait dengan penggunaan dana itu sendiri. Akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa dilihat dari akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program akan dibahas berikut ini:

Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dilihat dari Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang lain diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Dalam melaksanakan peraturan dan keputusan yang berlaku perangkat hukum wajib untuk melakukan

monitoring/pemeriksaan/audit segala maca proses pelaksanaan pembangunan fisik maupun sistem administrasinya. Subfokus dari akuntabilitas hukum adalah: Kepatuhan terhadap hukum dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Kepatuhan terhadap hukum yaitu bagaimana pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di pemerintah desa tentang bagaimana penggunaan alokasi dana desa itu sendiri. Terdapat beberapa peraturan terkait dengan Alokasi Dana Desa diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 212 Ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan sumber pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; bantuan dari

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Dari ketentuan tersebut secara tersirat alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Dalam Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa tujuan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan social, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah Azas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa diantaranya kemiskinan keterjangkauan, Pendidikan Dasar dan kesehatan.

5. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

Pengelolaan Dana Desa di Desa Kori sejauh ini berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah/Desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa informan maka dapat dikatakan bahwa dalam akuntabilitas hukum untuk penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Kori belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana ada pemerintah desa yang tidak menaati segala peraturan yang berlaku. Dalam hal ini diharapkan agar pemerintah desa mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan ADD dan melakukan monitoring dalam hal proses pelaksanaan pembangunan fisik maupun sistem administrasinya sehingga berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dilihat dari Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan proses dan prosedur yang dijalankan. Apakah proses dan prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah dijalankan secara baik. Dalam akuntabilitas proses yang menjadi subfokus adalah: Prosedur/mechanisme kerja yang sesuai.

Pengelolaan Alokasi dana Desa harus direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak bagi kepentingan seluruh masyarakat desa. Perencanaan dan penganggaran ADD tentu harus melalui mekanisme dan prosedur yang tepat agar ADD tersebut dapat tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap

informan maka dapat disimpulkan bahwa Dana desa yang diterima dapat dikelola secara baik demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Mekanisme perencanaan penggunaan ADD di Desa Kori yaitu melalui musyawarah tingkat dusun dan musyawarah tingkat desa merupakan upaya bertahap dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sekaligus sebagai wadah pembelajaran terhadap nilai akuntabilitas pelaksanaan ADD. Pelaksanaan musyawarah bertujuan untuk membahas rencana penggunaan dana dan selanjutnya pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa. Dalam akuntabilitas proses diharapkan pemerintah desa mampu menyesuaikan proses pembangunan sesuai dengan kondisi desa dan tidak adanya keterlambatan melakukan pertanggungjawaban dana.

Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dilihat dari Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Program yang direncanakan pemerintah desa Kori harus dilaksanakan dengan baik agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang menjadi subfokus dalam akuntabilitas program yaitu: Pelaksanaan program yang sesuai dengan pelaksanaan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Guna melaksanakan beberapa program kegiatan yang ditetapkan Pemerintah Desa Kori, maka anggaran dan belanja desa perlu dikelola dengan

baik. Pengelolaan anggaran dan belanja yang baik harus dilaksanakan agar pengguna anggaran mampu mempertanggungjawabkan dana yang dikelola kepada pihak yang memberi tanggungjawab. Dalam hal akuntabilitas penggunaan ADD dilihat dari akuntabilitas program adapun program-program dalam:

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
 - Belanja pegawai untuk penghasilan tetap dan tunjangan
 - Belanja barang dan jasa untuk operasional perkantoran
2. Program Pembinaan Masyarakat

Program di atas telah dilaksanakan sesuai rencana kegiatan pembangunan desa, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan desa Kori pada tahun 2018 telah berjalan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Kori dan realisasinya sudah sesuai Rencana Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2018. (Rencana Program dan Rencana Anggaran Desa Kori Tahun 2018 serta pertanggung jawaban terlampir). Program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat juga dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai Visi dan Missi desa Kori. Namun untuk selanjut agar keberlanjutan pembangunan di desa

perlu secara intensip dilakukan pengkajian dan pemetaan masalah sosial kemasyarakatan dan pengkajian potensi sosial ekonomi desa untuk dapat meningkatkan sumber penerimaan desa sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terjadi ke depan.

KESIMPULAN

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada 3 dimensi akuntabilitas yakni akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program.

1. Akuntabilitas Hukum

Penggunaan keuangan desa mematuhi segala peraturan hukum yang berlaku. Alokasi Dana Desa di Desa Woloede belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana ada pemerintah desa yang tidak menaati segala peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan peraturan yang berlaku aparat penegak hukum mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan ADD dan melakukan monitoring dalam hal proses pelaksanaan pembangunan fisik maupun sistem administrasinya sehingga berjalan dengan baik.

2. Akuntabilitas Proses

Dana desa yang telah diterima dikelola secara baik demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Mekanisme perencanaan penggunaan ADD yakni melalui musyawarah tingkat dusun dan musyawarah tingkat desa yang merupakan upaya bertahap dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sekaligus sebagai wadah pembelajaran masyarakat terhadap nilai akuntabilitas pelaksanaan ADD. Dalam akuntabilitas proses, pemerintah desa mampu menyesuaikan proses pembangunan sesuai dengan kondisi desa dan tidak adanya keterlambatan melakukan pertanggungjawaban dana.

3. Akuntabilitas Program

Perencanaan program dalam alokasi dana desa di desa Woloede direncanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Selain itu, program yang dijalankan sesuai dengan program yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Namun, dalam pelaksanaan program ada kendala yang dihadapi yakni kurangnya pendekatan dengan pemilik lahan dan keterlambatan pendropingan yang dilakukan oleh supplier serta belum adanya bimtek atau pelatihan kepada masyarakat terkait dengan program BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Hopwood, Anthony dan Tomkins, 1984. *Masalah Dalam Akuntansi Sektor Publik*, Oxford: Philip Allan
- Hudayana, 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan ADD: Pengalaman Enam Kabupaten, Makalah Pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)*, Lombok Barat.
- Juliantara, 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, Pembaharuan*. Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2000. *Akuntabilitas dan Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN, Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

Permendagri Nomor 37.2007. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Permendagri Nomor 113.2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Dokumen:

Permendagri No.114 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Desa

Siagian, Sondang P. 2005. *Admistrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya.* Bumi Aksara: Jakarta

Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa